

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PROGRAM**

**KOTAKU DI KOTA BANDA ACEH**

(Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak  
di Gampong Jawa)

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MUSTAQIM**

**NIM. 170801027**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2024**

**“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KOTAKU DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak  
di Gampong Jawa) “**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan  
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**MUSTAQIM**

**NIM. 170801027**


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing II

  
Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 198401012015031003

  
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.s  
NIDN 2008048903

**“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PROGRAM  
KOTAKU DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak  
di Gampong Jawa) “**

**SKRIPSI**

**MUSTAQIM**

**NIM. 170801027**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024 M

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 198401012015031003

Sekretaris



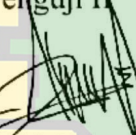
Dani Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.s  
NIP. 198904082023211022

Penguji I



Ramzi Murziqin, M.A  
NIP. 198605132019031006

Penguji II




Arif Akbar, M.A  
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197403271999031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustaqim  
NIM : 170801027  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PROGRAM KOTAKU DI KOTA BANDA ACEH (Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak di Gampong jawa)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Fisip dan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 23 APRIL 2024

Yang Menyatakan,



Mustaqim

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Pembangunan Pengembangan Program KOTAKU Di Kota Banda Aceh (Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak di Gampong Jawa). Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. berdasarkan observasi awal penulis melihat pelaksanaan KOTAKU di Gampong Jawa belum sepenuhnya terlaksana meskipun sudah berjalan selama 3 tahun. Seperti yang sangat mencolok dapat dilihat dari keberadaan MCK yang dapat diakses warga. Pembangunan di bidang sanitasi Gampong Jawa terlihat masih sangat minim belum lagi permasalahan persampahan yang sangat mengganggu. Tujuan penelitian ini mengetahui kesiapan Pemerintah Gampong dalam pembangunan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan program, terdapat 4 tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program KOTAKU, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tahap keberlanjutan. Selain itu juga terdapat fasilitasi pembentukan forum kemitraan di tingkat kecamatan. Dengan demikian setiap kegiatan tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Gampong Jawa diantaranya ketersedian anggaran, adanya kerja sama pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh. Sedangkan faktor penghambat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu kepadatan jumlah penduduk dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.

Kata Kunci: KOTAKU, Kota Banda Aceh, Gampong Jawa

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1. Kebijakan Publik.....	12
2.3.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	24
2.3.2 Teori Perubahan Sosial .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. Fokus Penelitian .....	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5. Informan Penelitian.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1. Profil Gampong Jawa.....	34
4.2. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Indikator Pembangunan Layak Sanitasi di Gampong Jawa .....	39
4.2.1. Tahap Perencanaan Pembangunan.....	41
4.2.2. Tahap Servey Lokasi.....	44
4.2.3. Tahap Pendanaan .....	46
4.2.4. Tahap Pelaksanaan .....	47
4.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program KOTAKU Berdasarkan Indikator Pembangunan Sanitasi Yang Layak Di Gampong Jawa .....	50
4.3.1. Faktor Pendukung.....	51
4.3.2. Faktor Penghambat .....	53

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tersebut satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.<sup>1</sup>

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.<sup>2</sup>

Kota Tanpa Kumuh menjadi penting untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh

---

<sup>1</sup> Website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses pada tanggal 8 November 2021 situs: <http://kotaku.pu.go.id/>. Pengertian KOTAKU.

<sup>2</sup> ibid

perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Indikator Kota Tanpa Kumuh tercatat 23 indikator yang dikelompokkan dalam 8 klaster yaitu 1. Bangunan Gedung, 2. Jalan Lingkungan, 3. Penyediaan Air Minum, 4. Drainase Lingkungan, 5. Pengelolaan Air Limbah, 6. Pengelolaan Persampahan, 7. Pengamanan Kebakaran, 8. Ruang Terbuka Publik.<sup>3</sup>

Di Indonesia Program KOTAKU akan dilaksanakan pada 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota dan pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektar. Program KOTAKU ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016.

Sumber pembiayaan Program KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. Sementara di Provinsi Aceh Program KOTAKU sudah mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten

---

<sup>3</sup> ibid

seperti Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Subulussalam, Kota Sabang dan salah satunya juga termasuk Kota Banda Aceh.<sup>4</sup>

Di banding daerah lain Kota Banda Aceh menempati posisi unggul dalam pelaksanaan Kotaku. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Banda Aceh hingga 2019 berhasil mengubah kawasan kumuh seluas 465,24 hektar menjadi lebih indah yang meliputi 35 gampong di dalam wilayah Kota Banda Aceh. Dalam pembangunanya dilibatkan 4 perkampungan prioritas yang masuk proyek KOTAKU yaitu Gampong Alue Naga, Luengbata, Keuramat, dan Peuniti berikut detailnya:

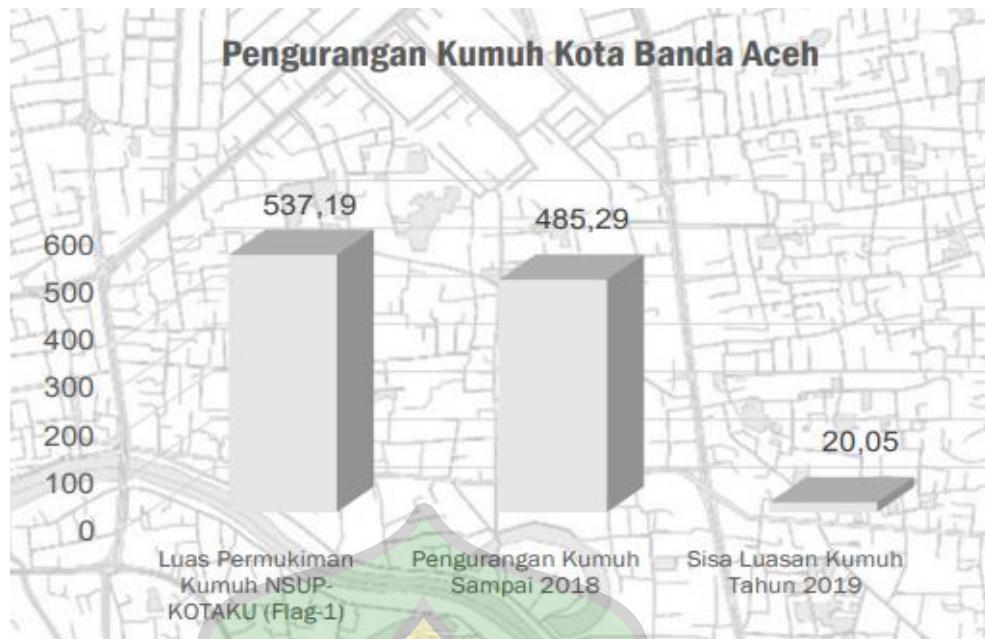
No	Nama Gampong	Kecamatan	Luas wilayah	Jumlah Masyarakat	Kepadatan Penduduk
1	Alue Naga	Syiah Kuala	240 Ha	1596 Jiwa	10
2	Luengbata	Luengbata	66,4 Ha	3372 Jiwa	10
3	Keuramat	Kuta Alam	48,8 Ha	4505 Jiwa	10
4	Peuniti	Baiturrahman	48,75 Ha	6649 Jiwa	5

*Tabel 1 Data SIMKAP Kota Banda Aceh*

Melalui Program KOTAKU, tahun 2019 dari total seluas 485,29 hektar kawasan kumuh dan sedangkan 20 Hektar lagi akan di diselesaikan pada tahun 2022. Berikut grafik pengurangan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh:

---

<sup>4</sup>ibid



#### *Data Dinas Pekim Kota Banda Aceh*

Salah satu Gampong yang juga ikut serta melaksanakan Program KOTAKU adalah Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Gampong Jawa merupakan gampong yang terletak di tengah-tengah perkotaan dengan luas wilayah sebesar 150 Ha. Gampong Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.027 jiwa dengan pembagian 5 dusun yaitu pertama Dusun Nyak Raden dengan jumlah masyarakat 369 jiwa, kedua Dusun Hamzah Yunus dengan jumlah masyarakat sebanyak 407 jiwa, ketiga Dusun Tuan Dibanda dengan jumlah masyarakat sebanyak 445 jiwa, keempat Dusun Said Usman dengan jumlah masyarakat sebanyak 869 jiwa dan kelima Dusun Tgk Muda dengan jumlah masyarakat sebanyak 937 jiwa.

Sebagian besar masyarakat Gampong Jawa bekerja di sector kewirausahaan, jasa, pemerintahan, nelayan, wiraswasta dan PNS. Gampong Jawa juga menjadi lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Pemerintah Gampong Jawa mulai dari tahun 2018 sudah

menggalakkan program Kotaku. Pada tahun 2015 kawasan kumuh di gampong jawa mencapai 95,03 Ha dari total luas wilayah sebesar 150 Ha. Pada tahun 2020 tersisa kawasan kumuh sebanyak 79,09 Ha ini menandakan adanya peningkatan dalam penanganan kawasan kumuh di Gampong Jawa.

Namun berdasarkan observasi awal penulis melihat pelaksanaan KOTAKU di Gampong Jawa belum sepenuhnya terlaksana meskipun sudah berjalan selama 3 tahun. Seperti yang sangat mencolok dapat dilihat dari keberadaan MCK yang dapat diakses warga. Pembangunan di bidang sanitasi Gampong Jawa terlihat masih sangat minim belum lagi permasalahan persampahan yang sangat mengganggu. Dapat dilihat dari foto berikut:



Foto sampah

Foto Saluran Air penuh dengan sampah

Kejadian ini menjadi menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis ingin menelusuri lebih mendalam tentang ***Kebijakan Pembangunan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Penanganan Masalah Sanitasi Yang Layak Di***

*Gampong Jawa*). Dalam pembangunan sanitasi terdapat tiga sektor yang menjadi ruang lingkup pembangunannya, yaitu sektor air limbah, sektor persampahan, dan sektor drainase. Namun pada penelitian ini peneliti membatasi pada sanitasi untuk sektor air limbah.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berdasarkan indikator pembangunan layak sanitasi di Gampong Jawa ?
2. Faktor-faktor apa saja yang pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Gampong dalam pembangunan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU berdasarkan indikator pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa

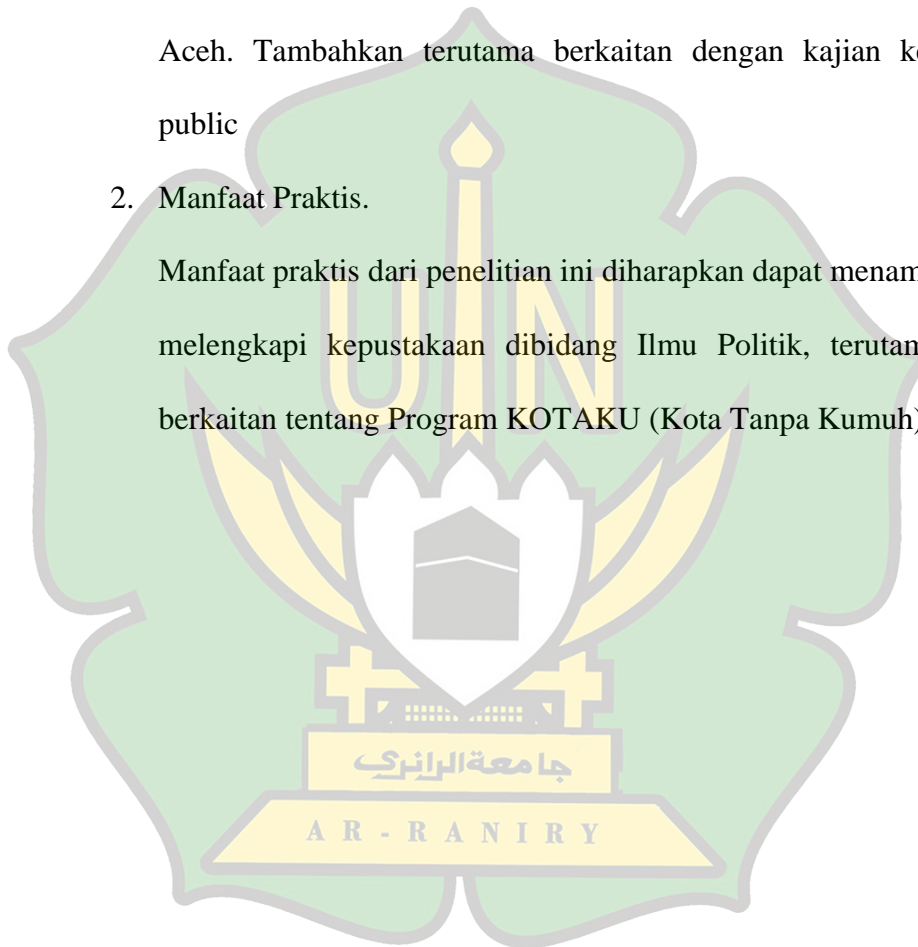
#### **1.4. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tambahkan terutama berkaitan dengan kajian kebijakan public

##### **2. Manfaat Praktis.**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Sahria Apriliana dikutip dari jurnal keluaran tahun 2018 dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan) yang diterbitkan oleh Fakultas Fisip Universitas Mulawarman. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan dan mencari tahu faktor-faktor pembahmbat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan, hanya saja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan belum maksimal hal ini dapat dilihat dari pada perencanaan hanya beberapa saja warga yang terlibat, dalam pelaksanaannya belum semua warga ikut dalam kegiatan pelaksanaannya karena kesibukan masyarakat akan pekerjaan/profesinya, dan tahapan evaluasi belum adanya peningkatan secara signifikan terhadap manfaat drainase itu sendiri. Faktor penghambat meliputi masih kurangnya kesadaran/kemauan masyarakat itu sendiri, kesibukan masyarakat terhadap pekerjaannya yang menjadikan ketidakhadiran masyarakat dalam

perencanaan maupun pelaksanaannya, kurangnya kepercayaan masyarakat tentang penyelenggaraan program Kotaku, seperti penyelewengan dana untuk menyelenggarakan program tersebut, kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dipungkiri akan mengharapkan imbalan, kurang pahami masyarakat akan pembangunan yang baik dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri, dan fasilitas yang kurang memadai.<sup>5</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Gita Monita Kusumaningtyas dikutip dari jurnal keluaran tahun 2021 dengan judul Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Memperbaiki Drainase Di Lingkungan Kota Kebumen. Tujuan penelitian ini untuk melihat perbaikan drainase di lingkungan Kota Kebumen dalam mendukung pembangunan kota tanpa kumuh. Penelitian ini menggunakan metode survey lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Program KOTAKU terdiri dari 8 indikator yang salah satunya adalah drainase lingkungan. Pemerintah Kota Kebumen sebagai salah satu kota yang menerima fasilitas program ini khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kebumen yang juga memfokuskan diri terhadap perbaikan drainase di lingkungan Kota Kebumen. Selama tiga tahun terakhir semenjak 2017 hingga 2019 telah terjadi banjir selama 6 kali, hal ini disebabkan karena tanggul drainase yang jebol akibat tidak mampu menahan luapan air yang ada. Permasalahan tanggul drainase yang jebol

---

<sup>5</sup> Sahria Apriliana, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)* Jurnal Fakultas Fisip Universitas Mulawarman Vol. 6, No.1, Juni 2018.

ini dikarenakan adanya penumpukan sampah yang berskala besar sehingga menyebabkan banjir dan merugikan beberapa masyarakat.<sup>6</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hasan dikutip dari Jurnal tahun 2020 dengan judul Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman Kumuh di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang diterbitkan oleh Planologi UNDIP dengan tujuan penelitian untuk Mengetahui konsep pemangan sanitasi di lokasi penelitian tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Metode Analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif, metode skoring, dan metode klaster. Berdasarkan hasil Analisis, ketersediaan prasarana sanitasi di lokasi penelitian masih kurang untuk prasarana persampahan yaitu tempat sampah, sedangkan untuk prasarana limbah dan sudah mencukupi. Untuk tingkat permasalahan, hanya RW 3 Kelurahan Dinoyo dan RW 7 Kelurahan Tlogomas yang berada pada tingkat tinggi (baik), sedangkan RW 5 Kelurahan Tlogomas dan RW 9 Kelurahan Jatimulyo berada pada tingkat rendah (buruk). Untuk konsep penanganan, terdapat 3 macam konsep yang diterapkan di lokasi penelitian yaitu percontohan, partisipatori, dan bantuan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ketersediaan prasarana persampahan di lokasi penelitian masih kurang dan tidak ada hubungan antara konsep penanganan yang diterapkan dengan tingkat permasalahan sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu kriteria permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang, meliputi

---

<sup>6</sup> Gita Monita Kusumaningtyas, *Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Memperbaiki Drainase Di Lingkungan Kota Kebumen*, Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM) vol. 2, No. 2, Juli 2021.

masalah persampahan, air limbah, dan drainase. Permasalahan tersebut tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang, salah satunya adalah Kecamatan Lowokwaru. Berbagai penanganan telah dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan sanitasi di Kecamatan Lowokwaru, antara lain penanganan sanitasi di RW 3 & RW 6 Dinoyo, RW 5 dan RW 7 Tlogomas, dan RW 9 Jatimulyo.<sup>7</sup>

Penelitian keempat dilakukan oleh Herawaty Riogilang 2016 dikutip dari jurnal yang berjudul Identifikasi Dan Pedampingan Untuk Mengatasi Masalah Sanitasi Pada Pemukiman Kumuh Di Kampung Sanger, Sario Manado diterbitkan oleh LPPM Bidang Sains dan Teknologi Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi informasi dan pendampingan kepadamasyarakat bagaimana mengatasi masalah pada pemukiman kumuh dan Pembuatan sistem sanitasi dan drainase yang sehat. Meningkatkan tingkat kesejahteraan kesehatan masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan survey langsung kelapangan lokasi penelitian serta mendesain system sanitasi yang tepat untuk lokasi tersebut dan membuat rancangan drainase yang baik serta mengaplikasikan di lapangan.. Berdasarkan hasil survey daerah pemukiman kumuh di kampung Sanger memang layak untuk diperhatikan dan dibantu dalam penataan system drainasenya, karena yang ada saat inisistemnya begitu sederhana dan bisa berpotensi menjadi sumber penyakit karena terkesan seadanya dan sering tersumbat tumpukan

---

<sup>7</sup> Hasan, *Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman Kumuh di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*, Jurnal Planologi UNDIP vol. 22, No. 1, Februari 2020

sampah. Dengan latar belakang nelayan sumber utama mata pencaharian penduduknya sehingga fasilitas sistem drainasi yang ada belum bisa ditingkatkan.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan di atas memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini yaitu terletak di fokus penelitiannya berkaitan dengan penanganan sanitasi yang layak dan beberapa diantaranya juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dimana penulis akan meneliti Gampong Jawa Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Kebijakan Publik**

#### ***Penyusunan Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan dampak kecil sebaiknya tidak menimbulkan masalah yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan adayang rugi, disinilah letaknya harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Herawaty Riogilang, *Identifikasi Dan Pedampingan Untuk Mengatasi Masalah Sanitasi Pada Pemukiman Kumuh Di Kampung Sanger, Sario Manado*, jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

<sup>9</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Englewood, 1992), 2-4

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukannya emata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan Negara. Pakar Prancis, Lemieux merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivis-aktivis yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang terstruktur. Proses keseluruhan aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.<sup>10</sup>

Dalam proses pembuatan kebijakan publik pemerintah memerlukan model dalam menyusun suatu kebijakan, dengan adanya model tersebut pembuatan kebijakan publik dapat dilakukan untuk mengambil suatu keputusan atau pendapat dari berbagai pihak. Model ini juga dapat membantu pekerjaan pemerintah dalam memahami kebijakan publik yang kompleks, sehingga memudahkan tugas pemerintah dalam mengupayakan dalam memahami bagaimana proses perumusan atau proses implementasi kebijakan publik itu. Ada beberapa model yang digunakan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Andrew Susilo, "Proses Dalam Pembuatan Kebijakan Publik" ,<http://www.semangat-anaknegeri.com/2014/06/proses-dalam-pembuatan-kebijakan-publik.html> ( 6 Desember 2021).

1. Model Elit, yaitu pembentukan kebijakan publik hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu.
2. Model Kelompok, yaitu model yang merupakan interaksi antar kelompok dan merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan kebijakan umum.
3. Model Kelembagaan, yaitu lembaga pemerintah. Yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah eksekutif (presiden, menteri-menteri, dan departemennya), lembaga legislatif (parlemen), lembaga yudikatif, pemerintah daerah.
4. Model Proses, yaitu rangkaian kegiatan politik mulai dari aktivitas masalah, perumusan usul, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasinya.
5. Model Rasialisme yaitu, untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu yang dirancang dengan tetap, untuk meningkatkan hasil bersihnya.
6. Model Inkriminalisme yaitu, berpatokan pada kegiatan masa lalu, dengan sedikit perubahan.

Dengan memperhatikan model-model di atas, membantu pemerintah untuk lebih mudah mengetahui tujuan daripada kebijakan yang harus diambil, sehingga Pemerintah dan anggota Dewan dapat memutuskan hasil yang lebih baik. Dengan kebijakan yang telah diambil dapat ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dan meningkatkan publik itu sendiri. Selain itu model yang digunakan

dalam proses pembuatan kebijakan publik maka pemerintah juga harus mengetahui tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan kebijakan publik agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melalui beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu:<sup>12</sup>

- a. Agenda penyusunan. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas.
- b. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap kebijakan formulasi. Dari berbagai masalah yang ada ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan.
- c. Adopsi Kebijakan. Dari cukup banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan mengadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini sering juga dengan tahap legitimasi kebijakan

---

<sup>12</sup> Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, (Boston: Wadsworth, 2009), 55

(*policy legitimation*) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi.

- d. Implementasi kebijakan. Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan sering kali berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.
- e. Evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dilihat, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai hasil yang diinginkan.

### ***Pelaksanaan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik yang digerakkan untuk

bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki. Sederhananya adalah realita implementasi melibatkan berbagai pihak dan menyangkut kepada hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.<sup>13</sup>

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel “penting” yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.<sup>14</sup>

Gow dan Morss menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, pertama adalah hambatan politik. Hambatan politik bisa saja terjadi ketika ada berbagai kepentingan para aktor didalamnya sehingga menjadikan kebijakan yang telah terencana menjadi tidak tepat sasaran. Kedua, kelemahan institusi. Institusi merupakan organisasi pelaksana penentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kegiatan baik itu sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun

---

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka 2004), 39

<sup>14</sup> *ibid*

pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tetapi terkadang hal ini menjadi hambatan ketika para pelaksana belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia. Ketidakmampuan sumber daya manusia pelaksana kebijakan dapat dikategorikan pada bidang teknis dan administratif yang kadang kala membuat masyarakat kebingungan ketika ada sebuah kebijakan-kebijakan yang baru, dimana ini sangat erat kaitannya dengan pemberitahuan kebijakan maupun program-program baru yang mana akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Keempat, perbedaan agenda tujuan aktor. Seringkali ketika kebijakan itu disusun, berbagai aktor kebijakan memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebijakan tersebut, sehingga yang terjadi adalah bukan kebijakan yang tertuju kepada kepentingan masyarakat, tetapi hanya kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam penyusunan tersebut.<sup>15</sup>

Hal inilah yang menjadikan sebuah kebijakan mengalami kegagasan dalam proses implementasinya, dimana proses implementasi kebijakan adalah bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya, sehingga antara perumusan kebijakan dengan implementasinya saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>15</sup>Chatib Basri, “*Tantangan Implementasi Kebijakan Publik*” <http://map.uma.ac.id/2020/10/tantangan-implementasi-kebijakan-publik/>. ( 6 Desember 2021)

### ***Dampak Kebijakan Publik***

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat dari output kebijakan ada dua macam yakni:

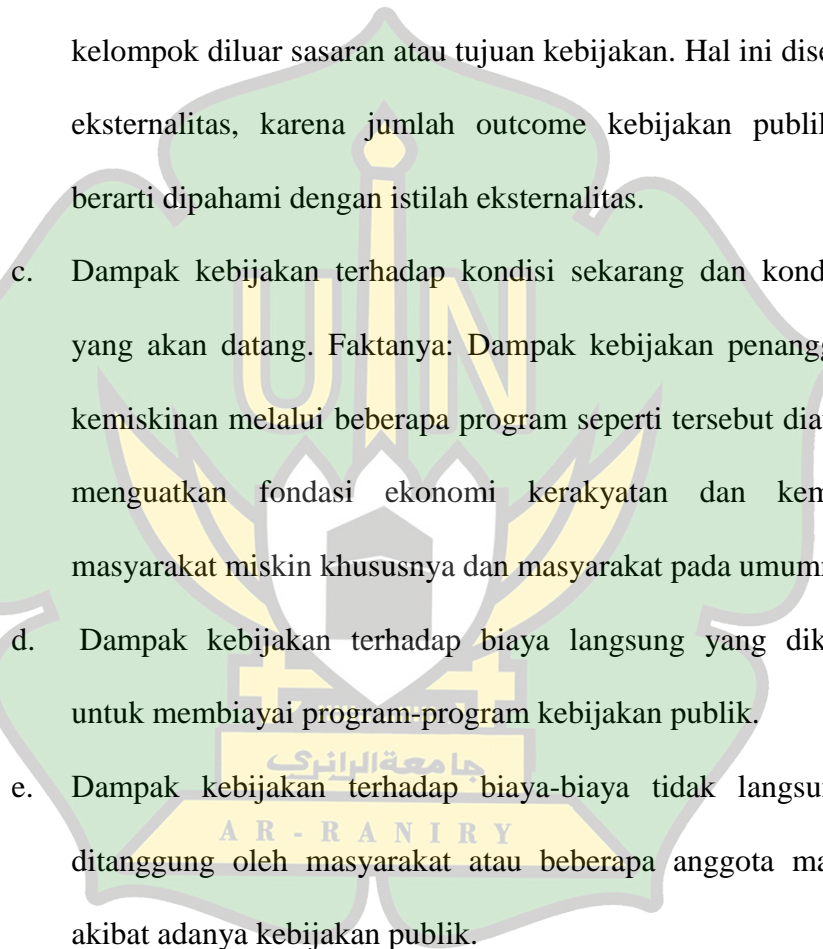
- a. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*).
- b. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yg diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Evaluasi dampak merupakan usaha menentukan dampak atas implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Thomas R. Dye ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008)

- 
- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Objek yang dimaksud masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
  - b. Dampak kebijakan terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Hal ini disebut efek eksternalitas, karena jumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
  - c. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang. Faktanya: Dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program seperti tersebut diatas, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  - d. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
  - e. Dampak kebijakan terhadap biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Karena itu menurut Dye, penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mata mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan

determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan.

### ***Pembangunan Sanitasi***

#### **a. Indikator Pembangunan Sanitasi**

- 1) Ada akses Sanitasi Layak yang Universal dan Setop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- 2) Ada fasilitas tempat buang air besar dan yang menggunakan, jenis kloset, tempat pembuangan akhir tinja, dan pengosongan tangki septik
- 3) Mendapat akses air bersih
- 4) Pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga serta tersedianya TPA
- 5) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

#### ***Dampak Pembangunan Sanitasi***

Sanitasi merupakan usaha menciptakan suatu keadaan atau perilaku hidup sehat dengan mengutamakan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas maupun perilaku yang mana untuk menghindari gangguan penyakit seperti diare. Sanitasi lingkungan merupakan status kesehatan lingkungan yang mencakup beberapa aspek antara lain pembuangan kotoran, perumahan, penyediaan air bersih dan sebagainya. Lingkungan sosial serta kelangsungan kehidupan manusia akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial lainnya. Oleh

sebab itu sangat perlu adanya kebijakan tentang sanitasi dimana sangat mempengaruhi seluruh elemen kehidupan.

Dengan adanya pembangunan sanitasi dapat memberi dampak perubahan pada 3 aspek yaitu aspek perubahan pada aspek fisik/lingkungan, dampak pada aspek ekonomi dan dampak pada aspek sosial. Berikut penjelasan lebih lanjut:

#### 1) Perubahan Pada Aspek Fisik/Lingkungan

- Bagi warga yang sebelumnya belum memiliki jamban sendiri dengan adanya pembangunan sanitasi kini sudah memiliki fasilitas jamban yang layak untuk buang air besar dan kecil
- Lingkungan menjadi nyaman dan aman
- Tidak ada pencemaran air tanah lagi, karena limbah sudah disalurkan dari IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
- Dengan dibangunnya MCK (Mandi, cuci, kaskus) maka akses masyarakat pedagang dan penjual di Pasar LOR yang berdekatan dengan lokasi pembangunan akan mudah untuk melakukan aktivitas buang air besar dan kecil.

#### 2) Perubahan pada aspek Ekonomi

- Menjadikan masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktifitas.
- Mengurangi biaya pengobatan akibat sanitasi yang buruk

### 3) Dampak Pada Aspek Sosial

- Tumbuhnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya.
- Hilangnya kebiasaan buang air kecil dan besar disembarang tempat.
- Diharapkan masyarakat lebih paham akan pentingnya menjaga lingkungannya dari pencemaran limbah rumah tangga.

#### 2.3.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah program sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan. Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesiasiaan dari rencana dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan lingkungan sosial dilakukan dengan memperhatikan paradigma, prinsip-prinsip dasar dan sejumlah rangkaian-tindakan atau tahapan.<sup>17</sup>

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-

---

<sup>17</sup> Jonny Purba, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2002. hlm. 31,

undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak. implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang- undang dan keputusan yudisial. Singkatnya implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi dan teknik-teknik pengendalian.<sup>18</sup>

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya dimana sarana-saraana tertentu

---

<sup>18</sup> Ibid hlm 55

dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas, implementasi dapat disimpulkan bahwa suatu program yang akan dikerjakan itu sesuai perencanaan yang telah dibuat, atau dengan kata lain tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah memberi program-program yang dibuat harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya.

### 2.3.2 Teori Perubahan Sosial

KingsleyDavis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver membedakan antara *utilitarian elements* dengan *culture elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kategori tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material.<sup>20</sup>

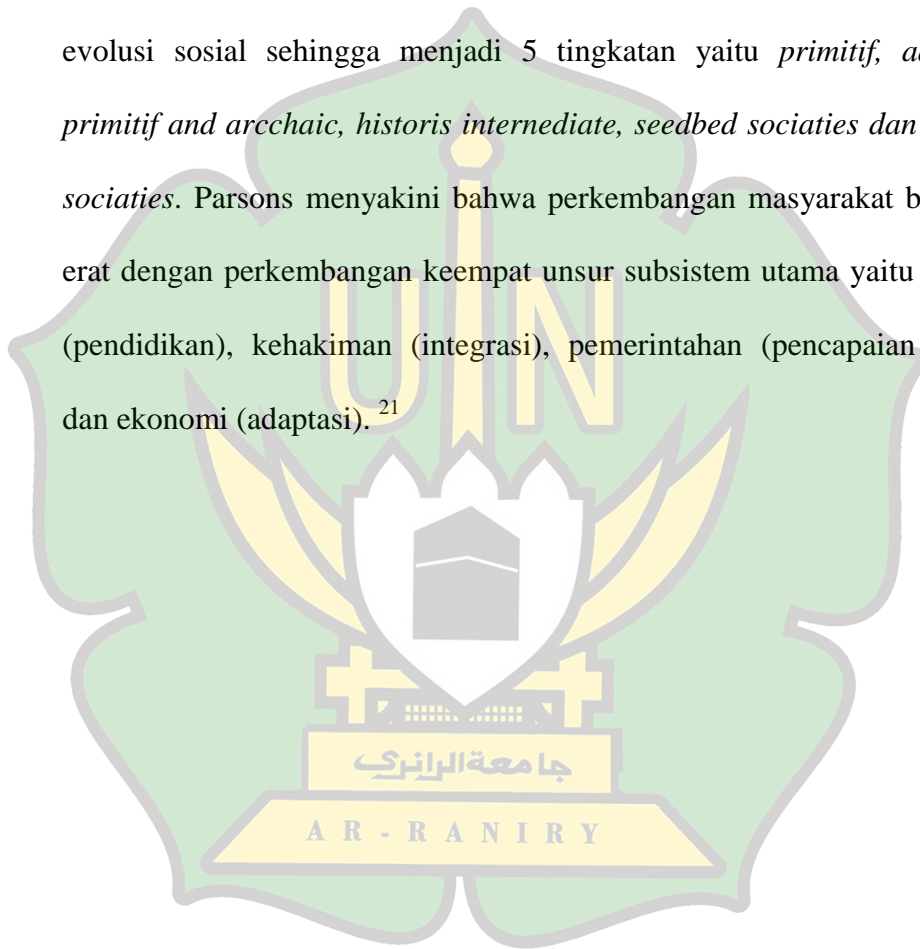
Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi

---

<sup>19</sup> Wayne Parsons, Public Policy Pengantar Teori & dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 463-467

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1990., hlm. 301

maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama yaitu primitif, intermediat dan modern. Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan yaitu *primitif, advanced primitif and archaic, historis internediate, seedbed sociaties dan modern sociaties*. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 350

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Kebijakan Pembangunan Pengembangan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Banda Aceh. Studi kasus penanganan masalah sanitasi yang layak di Gampong Jawa. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>22</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian melihat Kebijakan Pembangunan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Anti Kumuh) Di Kota Banda Aceh dari sudut pandang indikator penanganan masalah sanitasi yang layak di Gampong Jawa.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Jawa, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Program KOTAKU kota tanpa kumuh.

### **3.5. Informan Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang

sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut

Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini adalah:

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Gampong Jawa	1
2	Ketua Pemuda	1
3	Anggota DPRK yang berasal dari Gampong Jawa	1
4	Mayarakat 3 dusun	3
	Jumlah	6

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>23</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti

<sup>23</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b) Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan

---

<sup>24</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165

terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).<sup>25</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.<sup>26</sup>

### 3.7. Teknik Analisis Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara

---

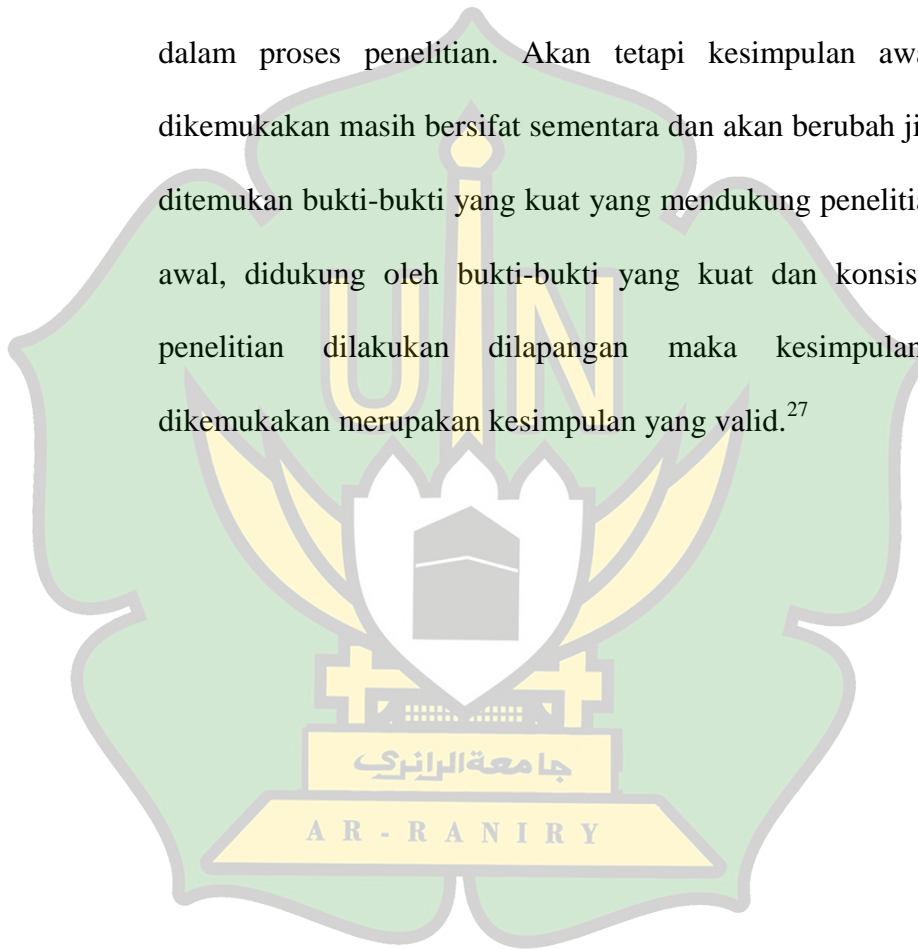
<sup>25</sup>Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018. hal.23,

<sup>26</sup>Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, Jakarta: Kencana, 2013. hal.100,

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018 hal.23,

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **4.1. Profil Gampong Jawa Kota Banda Aceh**

#### **a. Geografis Gampong Jawa**

Gampong Jawa merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Gampong Jawa terletak di daerah pesisir pantai, tepat berada di ujung gampong Jawa, yang berdekatan dengan pantai, dan di sana lah terdapat gunung sampah hasil dari tumpukan sampah-sampah yang dilakukan oleh petugas dinas kebersihan, yang sering disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Gampong Jawa memiliki luas tanah sekitar 150,60 Ha, dengan batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pande, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Peulanggahan dan di sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)<sup>28</sup>, seperti yang tertera dalam tabel berikut :

---

<sup>28</sup> Sejarah Gampong Jawa diakses melalui web <https://gampongjawa-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/> pada tanggal 20 Maret 2024

No	Batas Wilayah	Batas dengan Gampong	Batas Lain
1	Sebelah Utara	Lokasi TPA dan IPLT	Laut
2	Sebelah Timur	Gampong Pande	-
3	Sebelah Barat	Gampong Peulanggahan	-
4	Sebelah Selatan	Krueng Aceh	Sungai

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

Gampong Jawa Terdiri dari Lima Dusun dengan Luasnya Masing-Masing sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Nama Kadus	Luas Wilayah
1	Nyak Raden	Mohd Saleh	25, 13 Ha
2	Hamzah Yunus	T. Taufik	15, 37 Ha
3	Tuan Dibanda	Mahdi Z	18, 30 Ha
4	Said Usman	Zulhendra Surya	43, 19 Ha
5	Tgk Muda	Irwansyah	46, 60 Ha
	Jumlah		150, 60 Ha

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan luasnya wilayah Gampong Jawa. Berdasarkan 5 dusun, yang masing-masing Dusunnya memiliki luas wilayah yang berbeda-beda dan masing-masing dusun itu ditangani oleh 1 orang Kadus, seperti Dusun Nyak Raden yang memiliki luas wilayah sekitar 25,13 Ha Kepala Dusunnya Mohd Saleh, Dusun Hamzah Yunus memiliki luas wilayah 15,37 Ha Kadusnya T. Taufik, sedangkan Dusun Tuan Dibanda memiliki wilayah sekitar 18,30 Ha Kadusnya Mahdi Z, Dusun Said Usman yang memiliki wilayah sekitar 43,19 Ha Kadusnya Zulhendra Surya dan

Dusun Tgk. Muda yang memiliki luas wilayah sekitar 48,61 Ha Kadusnya Irwansyah, dan jumlah keseluruhan wilayah di Gampong Jawa adalah 150,60 Ha.

### b. Kependudukan Gampong Jawa

Jumlah Penduduk dalam Setiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Jumlah
1	Nyak Raden	191	172	363
2	Hamzah Yunus	220	215	435
3	Tuan Dibanda	212	214	426
4	Said Usman	415	404	819
5	Tgk Usman	521	492	1013
	Total	1559	1497	3056

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap dusun yang ada di Gampong Jawa, di dusun Nyak Raden terdapat laki-laki berjumlah 191 jiwa dan perempuan 172 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 363 jiwa, di dusun Hamzah Yunus terdapat laki-laki berjumlah 220 jiwa dan perempuan 215 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 435 jiwa, dusun Tuan Dibanda terdapat laki-laki 212 jiwa dan perempuan 214 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 426 jiwa, sedangkan di dusun Said Usman terdapat laki-laki 415 jiwa dan perempuan 404 jiwa, jadi keseluruhannya adalah 819 jiwa, dan di dusun Tgk. Muda terdapat laki-laki 521 jiwa dan perempuan 492 jiwa, dan keseluruhannya adalah 1.013 jiwa dan jumlah

pemulung di dusun Tgk. Muda berjumlah 470 jiwa, jadi di Gampong Jawa pada umumnya terdiri laki-laki sekitar 1.559 jiwa dan perempuan 1.497 jiwa, sehingga bisa kita lihat bahwa jumlah laki-laki di Gampong Jawa lebih banyak dari pada jumlah perempuan.

Data Penduduk Menurut Kepercayaan yang Dianut sebagai berikut:

Sumber: Data Hasil Dokumentasi Kantor Geuchik Gampong Jawa Pada Tahun 2022

No	Dusun	Jumlah Kepercayaan				
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Nyak Raden	371	0	0	0	0
2	Hamzah Yunus	434	0	0	0	0
3	Tuan Dibanda	423	0	0	0	0
4	Said Usman	835	0	0	0	0
5	Tgk Muda	987	6	0	0	0
Jumlah		3.050	6	0	0	0
		3.0356				

Dari tabel di atas bisa kita simpulkan bahwa di Gampong Jawa dominan penduduknya beragama Islam walaupun ada juga yang beragama Katolik.

Sarana Pendidikan di Gampong Jawa sebagai berikut:

No	Sarana Pendidikan	Unit
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP/MTSN	1
4	SMU/MAN	1
5	Balai Pengajian	7
Jumlah		11

Dari tabel di atas menunjukkan gambaran sarana pendidikan yang ada di Gampong Jawa, seperti TK ada 1 unit dan SD 1 unit SLTP 1 unit dan balai

pengajian ada 6 unit dan di Gampong ini tidak ada tersedianya pesantren/dayah.

#### **4.2. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Berdasarkan Indikator Pembangunan Layak Sanitasi di Gampong Jawa**

Pembangunan suatu wilayah seharusnya tidak diarahkan pada pembangunan yang bersifat fisik saja, tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara keduanya, pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain dan jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja. Pembangunan kesehatan dalam hal ini pembangunan sanitasi masyarakat merupakan salah satu contoh yang harus menerapkan perpaduan antara pembangunan fisik dan non fisik tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; disebutkan bahwa pembangunan kesehatan: Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>30</sup>

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk

---

<sup>29</sup> Muta'ali, Lutfi. (2019). KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pengalaman Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD). Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi – UGM

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dapat berperilaku hidup yang sehat dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mewujudkannya perlu pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan holistik, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dalam pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Pada Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pentingnya sanitasi layak secara khusus dicantumkan pada tujuan enam (6) SDGs (Sustainable Development Goals), dimana ditetapkan target atau sasaran capaian Pada tahun 2030, mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan (BABS).<sup>32</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka saat ini Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya akan pentingnya pembangunan sanitasi. Upaya tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dengan diluncurkannya program agenda nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2024. Target yang ditetapkan terhadap indikator outcome 2019-2024, yaitu 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% permukiman kumuh dikawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi. Untuk memastikan keberhasilan

---

<sup>31</sup> Putri, Y. L., & Utomo, H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening (Studi Persepsi Pada Pelanggan Dian Compp Ambarawa). *Among Makarti*, 10(19), 70–90.

<sup>32</sup> UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

program tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan program dan anggaran daerah dioptimalkan untuk pembangunan layanan air minum dan sanitasi.<sup>33</sup>

Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya pemerintah Gampong Jawa, tentunya wajib mendukung Program Universal Akses yang telah digaungkan oleh pemerintah pusat, dengan mengoptimalkan berbagai macam instrument kebijakan. Instrumen kebijakan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu instrumen regulasi, instrumen ekonomi, dan instrumen informasi. Kota Banda Aceh telah membuat beberapa kebijakan terkait pembangunan sanitasi antara lain membuat regulasi berupa Keputusan Walikota No 304 Tahun 2008 dibentuknya Tim sanitasi kota. Sebagai Acuan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi telah dibuat beberapa dokumen perencanaan, antara lain Buku Putih Sanitasi, Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK ), Rencana Induk Sistem Air Limbah Domestik, Rencana Aksi Daerah AMPL.

Pelaksanaan kegiatan program, terdapat 4 tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program KOTAKU, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tahap keberlanjutan.

#### **4.2.1. Tahap Perencanaan Pembangunan**

Pada saat proses perencanaan model komunikasi yang dilakukan antara pemerintah gampong, dinas Perkim, LKM, dan masyarakat adalah melalui musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan apa yang menjadi

---

<sup>33</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024

prioritas dalam pembangunan di Gampong Jawa serta menampung saran dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Geuchik Gampong Jawa dalam wawancaranya:

“Awal-awalnya sebelum diputuskan mau pembangunan apa atau bagian apa dulu yang akan dilakukan kita terlebih dahulu musyawarah dengan masyarakat kita yang dibawah oleh dinas perkim. Misal kayak kemarin kita prioritaskan pembangunan sanitasi pembuangan limbah karena menurut masyarakat ini menjadi salah satu pembangunan yang harus disegerakan supaya dapat menjaga kesehatan masyarakat dan pastinya terhindar dari penyakit.”<sup>34</sup>

Perihal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pemuda Gampong Jawa bahwa:

“Benar kita memang dilibatkan langsung diundang oleh Geuchik untuk ikut rapat dalam pembangunan kotaku itu, jadi waktu itu kita perioritaskan di gampong Jawa pembangunan sanitasi seperti WC umum, rumah-rumah masyarakat yang belum ada WC juga diusulkan agar dibangun, dan pembangunan pembuangan air limbah, kita sepakat bahwa pembangunan ini penting agar masyarakat tidak terkena penyakit karena pembuangan air limbah sembarangan.”<sup>35</sup>

Ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Gampong Jawa bahwa:

“Ada di panggil sama pak geuchik, diundang beberapa orang dari setiap dusun, kami disini punya 5 dusun ada hadir kalau tidak salah 7 orang untuk mewakili dari 5 dusun tadi. Waktu itu kami minta dibangun WC untuk setiap masyarakat yang belum ada WC di kalangan rumah kita, terus juga mengusulkan dibangun aliran pembuangan air limbah biar air limbah masyarakat itu ga kemana mana jadi satu tempat gitu.”<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Jawa Kota Banda Aceh Ayyub pada tanggal 22 Desember 2023

<sup>36</sup> Wawancara dengan masyarakat Gampong Jawa Kota Banda Aceh Asnawi pada tanggal 23 Desember 2023

Salah satu anggota DPRK Kota Banda Aceh juga menyampaikan bahwa mendukung penuh program Kotaku ini yang akan dilaksanakan di Gampong Jawa.

“Iya kita dukung penuh program pemerintah ini, apalagi ini untuk kepentingan masyarakat kita, Gampong Jawa kan tempat pembuangan sampah jadi perlu kebijakan dan program yang mengatur trntang tersebut. Jadi dengan adanya program Kotaku ini kita harapkan akan mengatasi masalah kesehatan dan kekumuhan yang ada di Gampong Jawa nantinya. Dan pastinya membawa Gampong Jawa kearah lebih baik.”<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tahap pembangunan sanitasi pertama yaitu tahap perencanaan dilakukan dengan cara musyawarah bersama masyarakat, perangkat gampong dan dibawah oleh Dinas Permukiman Kota Banda Aceh untuk menentukan pembangunan yang diprioritaskan. Masyarakat sepakat untuk membangun sanitasi yang layak untuk masyarakat sebagai program prioritas untuk mendukung program Kotaku.

Hasil dari perencanaan ini nantinya akan menjadi bahan pada tahap selanjutnya yaitu survey lokasi. Team yang terlibat dalam proses perencanaan adalah orang orang yang ditunjuk langsung oleh dinas Perkim. Tahap perencanaan program Kotaku sebagai upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan anggota DPRK Kota Banda Aceh Tgk.H.januar Hasan pada tanggal 5 Januari 2024

dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Geuchik Gampong Jawa dalam wawancaranya bahwa:

“Dari hasil musyawarah kita tadi akan kita jadikan bahan pertimbangan untuk pemilihan lokasi yang akan kita bangun. Ada tim lah yang terlibat itu ditunjuk langsung oleh pihak dinas perkimnya. Jadi sebenarnya kita juga ingin menjadi gampong yang layak huni sehingga bisa mencapai misi pak walikota untuk menjadikan Kota Bnada Aceh sebagai perkotaan layak huni.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa hasil dari perencanaan yang dilakuakan akan berlanjut ke tahap servey lokasi yang akan dibangun sanitasi. Untuk diketahui bahwa Perencanaan ditingkat kota disebut RP2KP (rencana penanganan pemukiman kumuh perkotaan) sedangkan tingkat masyarakat atau kelurahan disebut RPLP (rencana penataan lingkungan permukiman) atau RKM (rencana kerja Masyarakat).

#### **4.2.2. Tahap Servey**

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan actor terkait permukiman dan perumahan. Di dalam tahap survey lokasi ini dalam penanganan permukiman kumuh dan memenuhi kriteria layak agar dapat mengakses untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan pusat. Untuk survey lokasi berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) didampingi oleh LKM dan Kepala Dusun setempat serta pihak Kepala Gampong. Hal ini disampaikan oleh Geuchik Gampong Jawa dalam wawancaranya:

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

“Kita survey lapangan itu tidak langsung kita lakukan sendiri tapi didampingi oleh pihak dinas, faskel, kita juga ajak kepala dusun dan pastinya saya sebagai kepala gampong/geuchik. Kita lakukan ini untuk melibatkan seluruh pihak dalam pembangunan, nanti yang mana lokasi cocok akan kita jadikan tempat pembangunan yang akan kita bangun.”<sup>39</sup>

Kriteria dalam pemilihan lokasi survey dilihat dari luas pemukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar, penduduk, dan pelayanan dasar serta komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan permasalahan kawasan kumuh dan garis batas delinasi.

Dengan adanya tahapan survey lokasi sehingga tim Fasilitator dapat menentukan lokasi mana yang nantinya pas untuk dilaksanakan program Kotaku sehingga pelaksanaan program nantinya dapat dilakukan dengan tepat dan memiliki output sesuai dengan yang diharapkan. Proses komunikasi yang dilakukan pada saat survey lokasi adalah bahwa antar pelaksana kebijakan dan sasaran terbilang efektif melihat dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan DPRK Kota Banda Aceh dalam wawancaranya:

“Yang pasti sebelum dibangun ada namanya survey lapangan. Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelepasana program dengan kelompok saasaran. Komunikasi yang efektif dapat terjadi apabila tidak ada penyimpangan dari target hasil yang hendak dicapai, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh sasaran. Berbeda halnya dengan sumber daya, untuk

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

pendampingan tempat yang akan diservey dibawah langsung oleh dinas perkim itu, penunjukan tim faskel tidak melewati proses tertentu melainkan langsung ditunjuk oleh dinas PUPR.”<sup>40</sup>

Setelah proses survey lokasi dilakukan dan didapatkan hasilnya maka Faskel menyerahkan hasilnya kepada dinas Perkim yang mana nantinya hasil survey lokasi ini akan di naikan ke kepala dinas terlebih dahulu. Baru setelah itu dianggarkan untuk pembangunan yang telah disepakati.

#### **4.2.3. Tahap Pendanaan**

Sumber pembiayaan pada program Kotaku yang dapat digunakan dalam pembangunan sanitasi di Gampong Jawa Kota Banda Aceh berasal dari dana APBD Provinsi Aceh, APBD Kota Banda Aceh melalui dinas Perkim sebanyak 1 Miliar. Dengan dana yang sebanyak itu dan dilakukan pembangunan Gampong Jawa tingkat kekumuhanya sudah berkurang dari 90% sekarang sudah 20% menurut penjelasan dari informan dana akan dibagi untuk beberapa pembangunan dan pelatihan dengan persentase 80% pembangunan dan 20% pelatihan.

“Pendanaannya sekitar 1 Miliaran kalau tidak salah, sumber dananya dari APBD Provinsi dan APBD Kota Banda Aceh yang dibawah oleh Dinas Perkim. Dengan dana yang sebanyak itu dan dilakukan pembangunan Gampong Jawa tingkat kekumuhanya sudah berkurang dari 90% sekarang sudah 20% dan dana akan dibagi untuk beberapa pembangunan dan pelatihan dengan persentase 80% pembangunan dan 20% pelatihan. Ini kemarin disampaikan oleh pihak Perkim.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan anggota DPRK Kota Banda Aceh Tgk.H.januar Hasan pada tanggal 5 Januari 2024

<sup>41</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

Selanjutnya juga dijelaskan rician pembangunannya, dengan rincian pembangunan jalan setapak 1.295 meter, drainages 1.603 meter, MCK 1 unit dan air bersih 5 unit komunikasi pada saat tahapan pendanaan seperti apa yang disampaikan oleh informan yaitu adanya timbal balik antar dinas Perkim dan LKM sebagai implementor serta diketahui pihak Kelurahan.

“Rincian pembangunan jalan setapak 1.295 meter, drainages 1.603 meter, MCK 1 unit dan air bersih 5 unit. Dan untuk pengawasan kita terus membangun komunikasi yang baik dengan Perkim, LKM dan masyarakat.”<sup>42</sup>

Sikap pada saat tahap pendanaan sangat dibutuhkan tingkat kejujuran yang sangat tinggi apalagi ini berbicara tentang uang yang sangat sensitive, maka dapat dilihat sikap yang ditunjukkan oleh pihak LKM saat proses pelaporan pendanaan jujur dan demokratis. Struktur birokrasi pada saat pendanaan sesuai apa yang peneliti dapat pada saat wawancara adalah dinas Perkim menyerahkan dana kepada pihak LKM yang diketahui oleh Kelurahan dimana disini artinya ada keterkaitan birokrasi pada saat tahapan pendanaan berjalan baik. Hal ini disampaikan oleh Geuchik dan Anggota DPRK dalam wawancaranya bahwa:

“Untuk pendanaannya wajib dengan sikap jujur dan demokratis yang artinya terbuka dan transparan karena masalah anggaran pasti sensitif ya jadi harus benar benar diperhatikan. Jadi kalau tahapnya itu Perkim menyerahkan dana kepada pihak LKM yang diketahui oleh Kelurahan/gampong dimana disini artinya ada keterkaitan birokrasi pada saat tahapan pendanaan berjalan baik.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

<sup>43</sup> Wawancara dengan anggota DPRK Kota Banda Aceh Tgk.H.januar Hasan pada tanggal 5 Januari 2024

Dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kotaku pada tahap pendanaan dana yang di dapat berasal dari dana APBD melalui dinas Perkim dan diserahkan langsung kepada LKM selaku implementor program Kotaku. Pola komunikasi yang dilakukan antara pihak LKM dan dinas Perkim adalah sosialisasi terkait dana yang akan di berikan kepada LKM, Sumber daya manusia yang mengelolah pendaan pada program ini adalah Kordinator LKM sendiri dana yang di berikan oleh dinas Perkim sebesar 1 Miliar dengan persentase 80% pembangunan dan 20% pelatihan. Pada saat pembangunan terdapat proses pelaporan dalam hal apapun itu terkait penggunaan dana hal ini agar mengurangi resiko kesalah gunaan dana pelaporan tersebut terjadi antara LKM kepada pihak Faskel lalu pihak Faskel melaporkan kepada dinas Perkim.

#### **4.2.4 Tahap Pelaksanaan**

Pada dasarnya sebelum pada tahap terakhir pelaksanaan program setelah sebelumnya pada tahap perencanaan, survey lokasi dan tahapan pendanaan sudah di lakasanakan, seluruh tahapan tersebut merupakan wadah kalaborasi. Tahapan pelaksanaan program Kotaku sanitasi layak yang ada di Gampong Jawa sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman kumuh. Kegiatan yang dilaksanakan meruapakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah di koordinasikan.

Pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan di Gampong Jawa dengan penataan lingkungan ini menjadikan Gampong Jawa sebagai

kawasan bebas kumuh melalui penciptaan lingkungan yang bersih, indah dan aman serta dapat berkelanjutan. Melalui kegiatan yang saling terintegrasi tinggi ini dan mendukung visi dari program Kotaku yang disesuaikan dengan penanganan 4 indikator penetapan prioritas perubahan bangunan dan lingkungan dikawasan ini:

- a) Pengelolaan pembuangan limbah dan sampah
- b) Penataan jalan lingkungan saluran drainase
- c) Penataan ruang terbuka hijau dan public
- d) Penataan visual kawasan

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- a) Kemendesakan penanganan ( urgenitas )
- b) Tingkat permasalahan
- c) Dukungan sumberdaya
- d) Keberlanjutan kegiatan
- e) Aspek manfaat

Proses komunikasi pada saat pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara dengan informan adalah:

“Sebelum melakukan pelaksanaan terlebih dahulu ada sosiliasi kepada masyarakat terkait program Kotaku yang akan di laksanakan di lingkungan tersebut. Dan komunikasi yang dibangun antara LKM dan masyarakat berjalan dengan baik ,masyarakat dibekali pengetahuan terkait program Kotaku agar nantinya bisa memberikan kontribusi

pada saat pelaksanaan terlebih yang menjadi pelaksanaannya nanti adalah masyarakat yang ada di Gampong Jawa.”<sup>44</sup>

Pada tahap pelaksanaan program Kotaku di Gampong Jawa masyarakat di Gampong Jawa diperkerjakan untuk ikut membangun proyek itu hal ini tentu bisa membantu masyarakat disekitar lokasi pembangunan untuk mendapatkan pekerjaan karna mereka di beri gaji tidak hanya sekedar sukarela. Implementor implementor ini adalah orang orang yang sudah ahli di bidangnya meskipun tidak dibekali pelatihan terlebih dahulu. Dengan ini dapat dilihat bahwa sumber daya manusia pada saat pelaksanaan tidak dibekali dengan pelatihan khusus terkait pembangunan pada program kotaku hanya menilai berdasarakan aspek latar belakang pekerjaan para pekerja.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat hasil dari pelaksanaan program kotaku ini sudah sangat baik seperti pembangunan jalan setapak yang mana jalan yang tadinya rusak dan berlobang ketika mendapatkan program kotaku menjadi bagus dan nyaman untuk dilewati tetapi ada juga beberapa jalan setapak yang sudah rusak dikarnakan tidak adanya perawatan menurut apa yang peneliti lihat dlapangan. Banyaknya pembangunan di Gampong Jawa melalui program Kotaku ini membuat Gampong Jawa telah terbebas dari Kekumuhan sebesar 20% dari awalnya 90% hal ini tentu sudah membantu pemerintah mensukseskan visi dari program itu sendiri yaitu menjadikan kawasan kelurahan/desa terdekat kota menjadi kawasan yang aman,nyaman, dan bersih.

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Jawa Kota Banda Aceh Ayyub pada tanggal 22 Desember 2023

Komitmen yang tinggi diperlukan untuk melaksanakan program Kotaku ini bahwa LKM disini menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal sehingga program tersebut berjalan dengan tepat sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.

### **4.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program KOTAKU Berdasarkan Indikator Pembangunan Sanitasi Yang Layak Di Gampong Jawa**

#### **4.3.1 Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan pembangunan sanitasi yang didapatkan dari hasil penelitian, adalah sebagai berikut:

##### **a) Tersedianya Anggaran**

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Gampong Jawa untuk pembangunan infrastruktur ini sangat bermanfaat dan anggaran yang di keluarkan hampir mencapai 14 Miliar dan infrastruktur yang di bangun beragam agar apat mengatasi kawasan kumuh terutama dalam pembangunan sanitasi yang ada di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh ini.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan geuchik desa Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Gampong Jawa pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sekitar 500 Juta dari 4 desa se Aceh, sekarang sedang pembuatan jalan, rabat beton, saluran-saluran lingkungan. Kita sudah ushakan membangun semua infrastruktur yang di butuhkan oleh masyarakat

terutama nfrastruktursanitasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa menjalani hidup bersih.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil di atas maka adanya anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengatasi permukiman kumuh.

b) Kerja Sama Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Kumuh.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU adanya pengawasan atau survey yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebelum melakukan atau melaksanakannya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Dalam hal ini maka perlu adanya keikutsertaan aparatur Gampong terhadap pembangunan yang dibangun pada daerah tersebut.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini di selenggarakan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada daerah yang dibangun dan daerah yang dilakukannya program KOTAKU untuk mensejahterakan masyarakat sekitar permukiman. Pengawasan di lakukan pada setiap titik-titik dalam melakukan pembangunan infarstruktur dan adanya komunikasi dengan pihak Gampong dalam mengatasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Terkait dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Ketua Pemuda terkait dengan pelaksanaan Program KOTAKU adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

“Terhadap pelaksanaan program Kotaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini mereka melihat dulu beberapa kriteria yang terjadi pada permukiman yang akan di laksanakan program ini setelah adanya beberapa kriteria atau permasalahan yang terjadi seperti drainase lingkungan, jalan lingkungan, air limbah, persampahan, baru pihak Kantor KOTAKU ini turun ke lapangan titik yang akan dibangunkannya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang bisa menghilangkan kesan kumuh.”<sup>46</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan Kotaku ini pihak pemerintah melakukan servey atau sosialisasi terhadap pelaksanaan Kotaku ini yang dijalankan pada Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat**

Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi yang didapatkan dari hasil penelitian, adalah sebagai berikut:

a) **Kepadatan Jumlah Penduduk**

Untuk mengetahui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh dan pembangunan sanitasi yang layak di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam memaksimalkan permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang ada sebagai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Jawa Kota Banda Aceh Ayyub pada tanggal 22 Desember 2023

Terhadap permasalahan yang terjadi pada kawasan permukiman kumuh Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh seperti kepadatan penduduk. Maka dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan program Kotaku di Gampong Jawa untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan geuchik Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Dalam hal ini saya sebagai geuchik Gampong sangat mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Program Kotaku. Maka saya mendukung penuh pelaksanaan ini untuk menghilangkan kesan kumuh dan dengan pembangunan sanitasi yang layak pastinya akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil yang ada terhadap kepadatan penduduk yang terjadi maka adanya pengusuran rumah warga yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menata Gampong Jawa agar bersih dan terhindar dari permasalahan penyakit.

- b) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Gampong Jawa kurangnya dukungan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pada

---

<sup>47 47</sup> Wawancara dengan Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh Mukhlis pada tanggal 20 Desember 2023

program Kotaku dimana sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan terbebas dari permukiman kumuh.

Kemudian pola pikir masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai dan membuang kotoran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu dapat memicu permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Pemuda Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan pelaksanaan Kotaku ini ada sebagian masyarakat yang ikut serta terhadap pelaksanaan program ini, ada juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Kotaku ini. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang dibangun padahal infrastruktur tersebut dibangun untuk kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil yang ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam mendukung pelaksanaan program Kotaku juga tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini.

- c) Faktor lingkungan sosial dan ekonomi kurang mendukung terlihat dari mindset masyarakat terbiasa menerima bantuan, sehingga susah untuk swadaya. Kondisi lingkungan/ kebiasaan, apalagi daerah-daerah yang

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Jawa Kota Banda Aceh Ayyub pada tanggal 22 Desember 2023

dekat dengan sungai, itu akan susah sekali untuk dirubah agar tidak BABS.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh sudah berjalan secara maksimal dan membantu masyarakat sekitar dalam mengatasi permukiman kumuh terhadap sarana dan prasana yang telah dibangun.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan program, terdapat 4 tahapan kegiatan yang dilakukan dalam program KOTAKU, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tahap keberlanjutan Pertama, tahap perencanaan: Tahap perencanaan meliputi penyelesaian rencana penataan lingkungan pemukiman, kemudian kegiatan review sinkronisasi rencana teknis kawasan prioritas dengan rencana aksi penanganan kawasan kumuh dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemetaan masalah serta penyusunan rencana kerja. Kedua, Tahap Pelaksanaan: Pada tahap pelaksanaan akan diadakan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat serta monitoring pelaksanaan pekerjaan fisik. Selain itu juga akan ada serah terima dana yang akan digunakan untuk pembangunan proyek. Ketiga, Tahap Pengawasan: pada tahap ini terdapat kegiatan monitoring serta evaluasi triwulan pencapaian kinerja. Para fasilitator akan mengadakan evaluasi pencapaian kinerja dengan dinas Kota terkait capaian triwulan. Keempat, tahap keberlanjutan: setelah semua tahap berjalan, di tahap akhir ini terdapat kegiatan yang fokusnya adalah pemeliharaan dari program yang telah dicapai. Selain itu juga terdapat fasilitasi pembentukan forum kemitraan di tingkat kecamatan.

Dengan demikian setiap kegiatan tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Gampong Jawa diantaranya ketersedianya anggaran,

adanya kerja sama pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh. Sedangkan faktor penghambat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu kepadatan jumlah penduduk dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka maka peneliti ingin memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terlaksanakannya program Kotaku dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mensejahterakan masyarakat perlunya peran masyarakat agar dapat terlibat dalam mengatasi kekumuhan dan menambahkan kesadaran akan rasa memiliki fasilitas yang telah dibangun atau telah di laksanakan, tidak hanya pada saat tahun pertama pembangunan saja meningkatnya dalam menjaga fasilitas tersebut tetapi untuk jangka Panjang.
2. Terhadap pelaksanaan Kotaku ini kurangnya masyarakat dalam menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kurang maka dari itu peneliti mengajukan bahwa adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga permukiman tersebut agar tidak terjadinya lagi permukiman kumuh baru. Dan ketersediaannya sarana dan prasarana yang bisa membantu masyarakat sekitar.

## Daftar Pustaka

- Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media: Jakarta, 2004)
- Gita Monita Kusumaningtyas, *Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Memperbaiki Drainase Di Lingkungan Kota Kebumen*, Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM) vol. 2, No. 2, Juli 2021.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka 2004),
- Hasan, *Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman Kumuh di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*, Jurnal Planologi UNDIP vol. 22, No. 1, Februari 2020
- Herawaty Riogilang, *Identifikasi Dan Pedampingan Untuk Mengatasi Masalah Sanitasi Pada Pemukiman Kumuh Di Kampung Sanger, Sario Manado*, jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Kencana: Jakarta 2013)
- Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002)
- Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018)
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2008)
- Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, *Public Administration: An ActionOrientation*, (Boston: Wadsworth, 2009),
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Alfabeta: Bandung, 2014)
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Englewood, 1992)
- Wayne Parsons, *Public Policy Pengantar Teori & dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Website Resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses pada tanggal 8 November 2021 situs: <http://kotaku.pu.go.id/>. Pengertian KOTAKU

